



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGHENTIAN PERMANEN ASET KONSTRUKSI DALAM
PENGGERJAAN SEBANYAK 70 (TUJUH PULUH) REGISTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa 70 (tujuh puluh) register Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) telah diusulkan oleh Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD) untuk ditetapkan status penghentian permanen;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D angka 5 dan huruf E angka 5 Lampiran I Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi dalam Pengerjaan, penetapan status penghentian permanen aset konstruksi dalam pengerjaan melalui Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi dalam Pengerjaan Sebanyak 70 (tujuh puluh) Register;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
5. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 21044) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21018);
6. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi dalam Pengerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN STATUS PENGHENTIAN PERMANEN ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP) SEBANYAK 70 (TUJUH PULUH) REGISTER.

KESATU : Menetapkan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi dalam Pengerjaan Sebanyak 70 (tujuh puluh) Register dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Aset Konstruksi dalam Pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

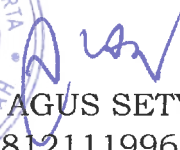
- a. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) berupa aset fisik sebanyak 3 (tiga) register; dan
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) berupa biaya penunjang sebanyak 67 (enam puluh tujuh) register.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGHENTIAN PERMANEN ASET
 KONSTRUKSI DALAM (KDP) SEBANYAK 70 (TUJUH PULUH)
 REGISTER

DAFTAR ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP) YANG DITETAPKAN
 (STATUS PENGHENTIAN PERMANEN)

A. Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) Berupa Fisik Sebanyak 3 (tiga) Register dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama PD/UKPD	Kode Barang	Reg.	Nilai
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	136010101003	1	3.215.932.000
2	Dinas Pendidikan	136010101003	2	2.905.376.448
3	Dinas Pendidikan	136010101003	10	3.330.104.018
Total				9.451.412.466

B. Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) Berupa Biaya Penunjang Sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Register dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama PD/UKPD	Kode Barang	Reg.	Nilai
1	Dinas Bina Marga	136010101004	136	94.589.000
2	Dinas Bina Marga	136010101004	20	826.031.250
3	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus	136010101005	7	155.935.780
4	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakbar	136010101004	8	47.789.000
5	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakbar	136010101004	3	11.993.500
6	Dinas Pendidikan	136010101005	2	75.460.000
7	Dinas Pendidikan	136010101005	3	75.636.000
8	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakbar	136010101003	1	5.912.000
9	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakbar	136010101003	2	50.880.000
10	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakbar	136010101003	3	10.584.000
11	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakbar	136010101003	4	12.180.800
12	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakbar	136010101003	5	15.360.000
13	Dinas Sumber Daya Air	136010101001	23	50.000.000

No.	Nama PD/UKPD	Kode Barang	Reg.	Nilai
14	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	136010101004	8	49.005.000
15	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	136010101003	5	378.015.000
16	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	136010101004	4	84.093.900
17	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	136010101003	1	45.650.000
18	Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	136010101003	6	33.313.000
19	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	136010101003	2	114.680.775
20	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	136010101003	3	123.659.800
21	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota - Jakbar	136010101003	4	14.877.700
22	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	3	8.528.666
23	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	25	1.355.332
24	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	26	1.701.457
25	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	27	35.261.965
26	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	28	13.835.851
27	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	29	3.961.990
28	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	33	1.257.985
29	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	35	34.458.085
30	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	36	8.729.652
31	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	37	1.197.263
32	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	38	4.396.493
33	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	39	19.660.507
34	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	40	4.410.403
35	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	41	5.994.354
36	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	42	2.187.813
37	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	43	2.453.385

No.	Nama PD/UKPD	Kode Barang	Reg.	Nilai
38	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	44	2.892.845
39	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	45	4.220.708
40	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	46	4.268.132
41	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	47	1.312.055
42	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	48	2.295.306
43	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	49	3.047.762
44	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	153	4.052.122
45	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	154	4.411.847
46	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	155	2.458.545
47	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	156	3.812.983
48	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	157	3.507.192
49	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	158	3.905.077
50	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	159	2.125.278
51	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	160	1.891.228
52	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	161	1.855.611
53	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	162	2.725.159
54	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	163	2.915.452
55	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	164	2.185.826
56	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	165	2.453.966
57	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	166	2.763.828
58	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	167	325.635
59	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	136010101001	168	326.651
60	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jakpus	136010101003	2	88.242.000
61	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jakpus	136010101003	1	17.859.105
62	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jakut	136010101003	11	23.965.890
63	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jakut	136010101003	12	11.195.032

No.	Nama PD/UKPD	Kode Barang	Reg.	Nilai
64	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jakut	136010101003	21	20.959.652
65	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jakut	136010101003	22	20.447.657
66	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jakut	136010101003	30	81.730.000
67	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jakut	136010101003	48	98.544.600
Total				2.847.734.850

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP. 196812111996031004